

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah, pemerintah dituntut dapat mengoptimalkan dana anggaran yang telah direncanakan. Hal ini menyangkut kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang nantinya akan diukur kinerjanya. Otonomi daerah ditujukan agar dapat mengelola secara mandiri baik pendapatan dan pengeluaran yang diterima oleh kabupaten/kota serta agar tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat. Sebagai tujuan untuk mensejahterahkan masyarakatnya pemerintah daerah juga harus mempunyai kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sedang melakukan proses pembangunan daerah. Pendapat yang diungkapkan oleh Pamudji dan Kaho (1998:124) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien tanpa ada biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sementara kalau terlalu ditahan-tahan pengeluarannya, maka akan membuat proyek daerah macet. Apabila dana pelayanan umum terlalu diirit, maka fasilitas umum akan memburuk. Allah SWT berfirman,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (QS. Al-Furqan 25:67).

Pemerintah daerah berhak mengelola serta mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang telah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah yang tercantum pada Undang-Undang No. 22 tahun 1999 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam memberikan anggaran tentu saja pemerintah pusat melihat potensi dan kondisi suatu wilayah untuk menganalisis perekonomian serta sumber daya yang ada di daerah tersebut agar efektif dan efisien. Alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah cukup banyak, diantaranya adalah analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Dwiyandari dan Badera, 2018).

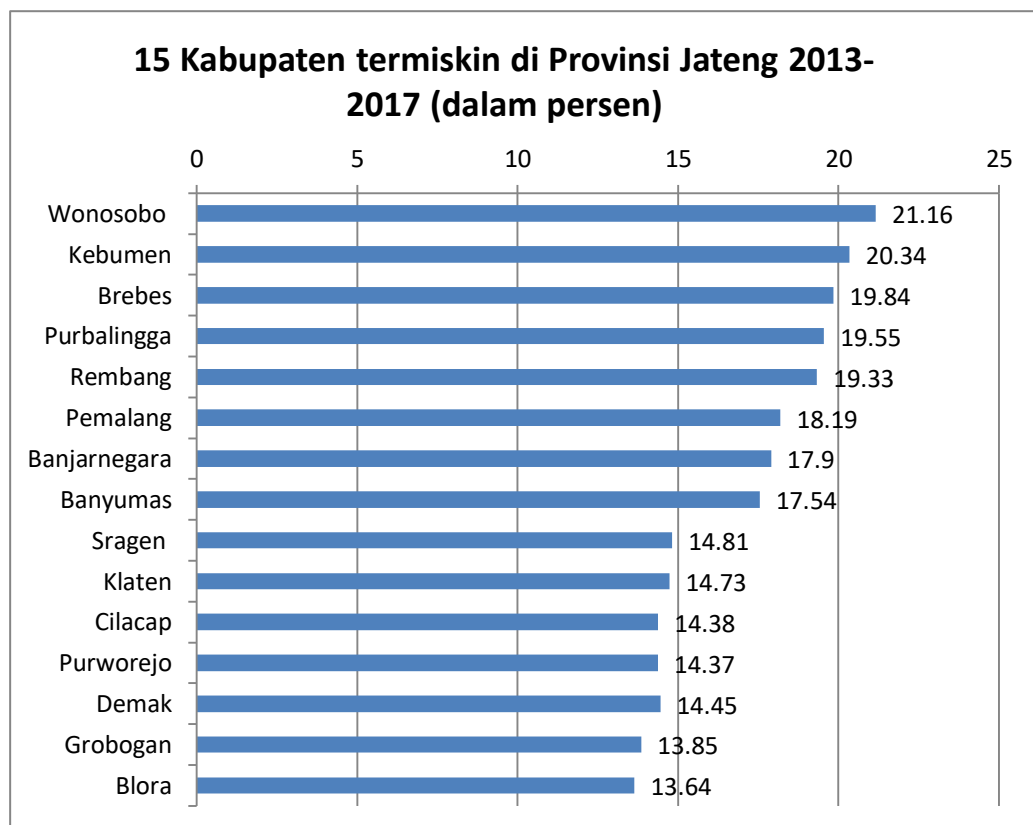
Kinerja keuangan daerah merupakan perbandingan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan hasil Realisasinya. Pemerintah Daerah dapat berhasil dalam kinerja keuangannya apabila tingkat rasio APBD dan realisasinya cukup tinggi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. Dengan adanya kewenangan pemerintahan yang lebih luas diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan suatu keuntungan bagi daerah tetapi pada sisi lain adanya kewenangan tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Darumurti dan Rauta, 2000;49). Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah tentu saja berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam hal ini masyarakat juga perlu

mengetahui APBD dan kinerja keuangan daerahnya serta kebijakan-kebijakan pemerintah apa saja yang dilakukan sebagai bentuk transparansi. Dengan adanya transparansi seperti itu maka masyarakat menjadi tahu bagaimana kinerja keuangan daerah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam transparansi keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif dan efisien maka pemerintah daerah wajib mempublikasikan tentang APBD kemudian dilakukan analisis kinerja keuangannya menggunakan upaya rasio fiskal. Upaya tersebut dapat mengetahui tingkat kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya. Semakin banyak target rasio yang dicapai maka akan semakin besar peluang pertumbuhan ekonomi. Mengingat pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tinggi pertumbuhan ekonomi makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan (Todaro, 2000).

Pada dasarnya, ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB untuk skala nasional atau persentase perubahan PDRB untuk skala Provinsi atau Kabupaten/Kota. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Ichwan, 2017).

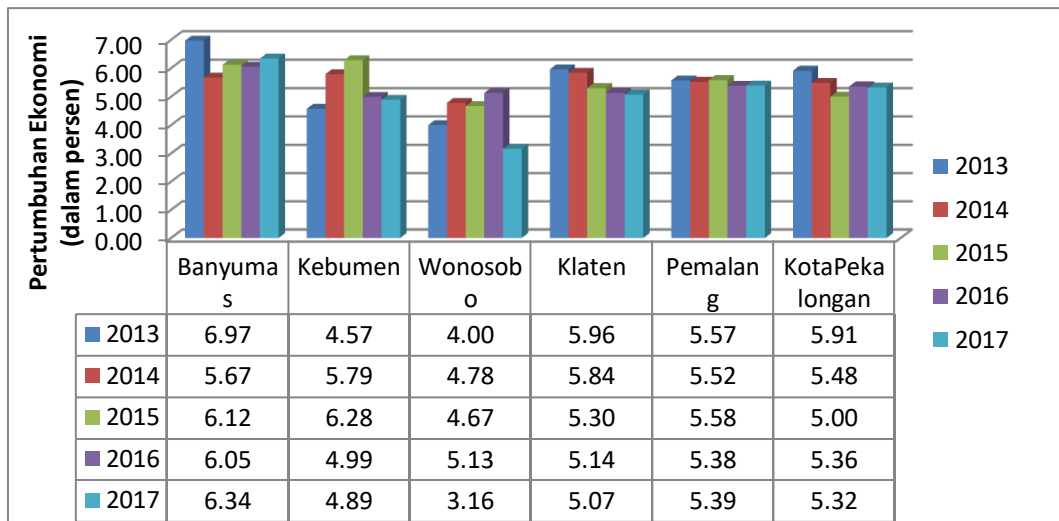
Penelitian ini yaitu meneliti tentang kinerja keuangan daerah kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan *purposive sampling*. Berikut ini adalah wilayah yang digunakan dalam penelitian yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemalang, dan Kota Pekalongan, jadi total ada 5 Kabupaten dan 1 Kota. Kabupaten tersebut dijadikan sampel karena masih termasuk kedalam 15 besar kabupaten termiskin dari 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Adapun data yang menunjukkan fenomena tersebut adalah:



Sumber : BPS Jawa Tengah (Data Diolah)

Gambar 1. 1
15 Kabupaten termiskin di Jawa Tengah

Dari data diatas bisa dilihat bahwa Kabupaten Wonosobo menempati posisi paling atas tingkat Kemiskinan dengan 21.16 persen diikuti Kabupaten Kebumen nomer dua dengan 20.34 persen. Kabupaten Pemalang menempati posisi ke enam daerah miskin dengan presentase 18.19 persen, kemudian Kabupaten Banyumas berada diurutan ke delapan dengan 17.54 persen. Selanjutnya Kabupaten Klaten menempati urutan ke sepuluh dengan 14.73 persen. Lima Kabupaten tersebut dipilih berdasarkan kriteria pemilihan sampel dan batasan masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu hanya Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Klaten yang mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pendapatan dan belanja daerah secara lengkap lima tahun dari 2013 sampai 2017 sedangkan 10 Kabupaten lainnya kurang lengkap. Sedangkan Kota Pekalongan sendiri tidak termasuk dalam 15 Kabupaten/Kota termiskin di Jawa Tengah tetapi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan masih fluktuatif atau belum stabil. Berikut ini adalah Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang ada pada penelitian ini:



Sumber : BPS Jawa Tengah (Data Diolah)

Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi

Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Wonosobo, Kab. Klaten, Kab. Pemalang, Kab. Kota Pekalongan

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 6 Kabupaten/Kota tersebut masih fluktuatif dengan pertumbuhan ekonomi berbeda setiap tahunnya. Kabupaten Banyumas mempunyai penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,30 persen. Kab. Kebumen pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun 2013 selama 3 tahun kemudian turun pada tahun 2016 dan 2017. Kab. Wonosobo pertumbuhan ekonomi tahun 2014 naik dan turun kembali pada 2015 penurunan paling signifikan pada tahun 2017 sebesar 1,97 persen. Kab. Klaten pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terus menurun namun tidak begitu signifikan. Kab. Pemalang pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun naik dan turun dengan tidak begitu signifikan. Kemudian pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan turun dua tahun berturut-turut pada 2014 sebesar 0.43 persen menjadi 5.48 persen dan tahun 2015 menjadi 5.00 persen. Kemudian tumbuh lagi sebesar 0.36 persen ditahun 2016 menjadi 5.36 dan kembali turun namun tidak signifikan sebesar 5.32 persen.

Hal yang menyebabkan kondisi tersebut karena kurang perhatian dari pemerintah daerah sehingga pertumbuhan ekonomi belum bisa stabil. Pemerintah daerah seharusnya bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi agar tumbuh lebih baik lagi dengan kebijakan-kebijakan yang dimiliki.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kinerja keuangan daerah merupakan kebijakan fiskal pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi itu jumlah nilai tambah PDRB yang didapat setiap tahunnya di suatu daerah. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang cukup efektif. Peran Pemerintah sebagai pelaksana otonomi daerah di setiap Kabupaten/Kota juga sangat penting dalam mengatur keuangan daerahnya untuk meningkatkan perekonomian agar dapat tumbuh dan stabil. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar penelitian fokus pada apa yang sedang diteliti. Adapun pembatasan ruang lingkup penelitian ini agar mempermudah pemecahan masalah yaitu:

1. Laporan Keuangan APBD yang dianalisis adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017.

2. Kinerja Keuangan Daerah dalam penelitian ini hanya diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal.
3. Pertumbuhan Ekonomi diukur dari laju PDRB atas harga dasar konstan.
4. Daerah yang diamati adalah 5 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Jawa Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 ?
2. Bagaimana pengaruh Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 ?
3. Bagaimana pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 ?
4. Bagaimana pengaruh Rasio Belanja Operasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 ?
5. Bagaimana pengaruh Rasio Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 ?
2. Mengetahui pengaruh Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 ?
3. Mengetahui pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 ?
4. Mengetahui pengaruh Rasio Belanja Operasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 ?
5. Mengetahui pengaruh Rasio Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 ?

E. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian terkait Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai pembelajaran untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan menambah wawasan tentang kondisi perekonomian daerah serta kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan untuk menentukan seberapa besar anggaran dan pendapatan yang harus digunakan agar optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

c. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan sebagai bentuk transparansi APBD yang dikelola oleh pemerintah daerah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan acuan atau referensi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan kajian studi yang sama.